

BPBD DIY INGATKAN MASYARAKAT

Waspada! Potensi Lahar Hujan Merapi

YOGYA (KR) - Peningkatan intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir perlu diimbangi peningkatan kewaspadaan masyarakat. Tidak hanya bagi warga yang tinggal di daerah perbukitan atau bantaran sungai, namun kewaspadaan juga perlu ditingkatkan bagi warga di Kawasan Gunung Merapi mengingat terdapat potensi bencana lahar hujan di kawasan tersebut.

"Kalau dilihat dari data yang dihimpun, volume air di puncak Merapi sudah mencapai 30 juta meter kubik. Hal itu dikarenakan curah hujan di DIY tergo-

long cukup tinggi. Kondisi ini akan berdampak pada terjadinya lahar hujan. Karena itu kami minta masyarakat selalu waspada terhadap kondisi di lingkungan sekitarnya," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Noviar Rahmad di Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (5/12).

Noviar mengatakan, adanya potensi bencana lahar hujan bisa menjadi ancaman bagi masyarakat saat musim penghujan. Apalagi jika lahar hujan itu mencapai sungai-sungai besar di Selatan Gunung Merapi. Jika lahar hu-

jan itu masuk ke sungai-sungai yang berhulu dari Merapi, otomatis akan terjadi peningkatan (volume).

"Kalau kemarin masih berada di bawah ambang batas, jadi masih aman. Meski begitu tetap perlu peningkatan status kedaruratan di Gunung Merapi. Untuk status kebencanaan di DIY siaga darurat bencana hidrometeorologi. Status ini didasari data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi curah hujan tinggi di DIY hingga Januari 2025," paparnya.

(Ria)-f



KR-Surya Adi Lesmana

KONDISI MERAPI: Wisatawan mengunjungi bunker Kaliadem di Kepuharjo, Cangkringan, Sleman saat Gunung Merapi cerah, Kamis (5/12/2024). Kemarin, usai cuaca cerah disusul hujan di puncak Merapi yang disertai aliran lahar. Kondisi cuaca yang tak menentu, perlu diwaspadai siapapun yang berkegiatan di lereng Merapi agar terhindar dari bencana.

DPR: Dengarkan

(UU HPP), namun seyogianya pemerintahan dapat terlebih dulu melihat dinamika yang berkembang di masyarakat. Puan lantas berkata, "Namun harapan dari DPR, saya yakin pemerintah pasti akan mendengarkan dulu aspirasi masyarakat."

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap rencana kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak menyulitkan masyarakat. "Harapan kami, tadi kami sama-sama sudah dengar aspirasi anggota DPR, kenaikan PPN 12 persen itu tidak menyulitkan rakyat yang pada saat ini kebanyakan menunggu, jangan sampai terbebani karena kenaikan PPN,"

302 Napi

Terkait kasus peredaran narkoba di lapas yang melibatkan sipir dan pimpinan lapas, Agus menyebut ada 14 pegawai di lembaga pemasyarakatan yang dinonaktifkan dari jabatannya. Sebanyak 14 pegawai lapas yang nonaktif itu mencakup kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas), kepala rumah tahanan (karutan), kemudian anggota kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP), sipir, dan pegawai lainnya.

"Mereka yang terlibat pesta sabu seperti yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian di Jember, yang diinformasikan, mereka diberikan hukuman khusus. Kemudian, kepada mereka tidak diberikan haknya berupa

ujar Dasco.

Sekalipun, kebijakan tersebut telah diamankan UU HPP untuk dijalankan oleh Pemerintah pada 1 Januari 2025. "Saya pikir kebijakan PPN itu adalah memang amanah dari undang-undang dan yang mengeksekusi adalah pemerintah," ucapnya.

Ia pun meminta publik untuk menunggu lebih lanjut keputusan resmi pemerintah atas rencana penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. "Pajak barang mewah sebesar 12 persen, dan menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya, setuju *nggak?*" ucapnya.

remisi sesuai yang diamanatkan undang-undang," kata Agus Andrianto.

Dalam beberapa minggu terakhir, kasus-kasus pesta sabu dalam sel terungkap, di antaranya yang terjadi di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kemudian di Lapas Kelas II-A Jember, Jawa Timur. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba, yaitu satuan kerja lintas kementerian/lembaga yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024. Desk itu, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, terdiri atas sejumlah k/l antara lain

Dasco menyampaikan hal itu saat diberi kesempatan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menanggapi interupsi permintaan pembatalan wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 yang disampaikan Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Rieke menuturkan, berdasarkan amanat Pasal 7 UU HPP, PPN dapat diubah bukan hanya paling tinggi menjadi 15 persen, melainkan bisa juga diubah paling rendah menjadi 5 persen.

"Keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya," kata Rieke.

(Ant)-d

Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

(Ant/Has)-d

Diplomasi

Apa makna lawatan presiden yang terkesan buru-buru ini? Bagaimana menerapkan politik luar negeri bebas aktif di tengah ketegangan hubungan antara AS dan China?

Terkesan buru-buru karena belum sebulan dilantik sebagai Presiden (24 Oktober 2024) Prabowo telah melakukan kunjungan marathon selama sepuluh hari ke negara-negara besar sejak 8 November 2004. Begitu banyaknya negara-negara yang di kunjungi; RRC, AS, Brazil, Peru, Inggris, UEA dan APEC tentu dengan berbagai agenda untuk berbagai sektor kepentingan.

Sulit bagi orang awam untuk memahami bagaimana sibuknya Prabowo menyiapkan dan mengorkestrasi perjalanan panjang ini. Selama lawatan ini presiden Prabowo tampil sangat prima, bahkan mendominasi setiap pertemuan puncak dengan tuan rumah, sampai beberapa pihak menilai bahwa lawatan kali ini dipimpin oleh Presiden merangkap Menlu.

Negara tujuan pertama lawatan ini adalah RRC, yang semula dikhawatirkan terjadi mispersepsi tuan rumah terhadap Prabowo yang terindikasi sebagai iorde baru ternyata dengan sangat cair dan wajar dilewati oleh Prabowo.

Kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin Prabowo sangat melancarkan lawatan itu. Maklum Prabowo pernah mengenyam

Sekolah Dasar di Hongkong selama dua tahun, setidaknya mengakrabbkan suasana ke-China-an dalam jamuan itu. Walhasil kesepakatan investasi senilai 160 triliun rupiah berhasil ditandatangani untuk keperluan berbagai sektor, termasuk bantuan untuk makan bergizi gratis di Indonesia.

Secara ekonomi, kesepakatan investasi dari China itu berlanjut dengan keberhasilan presiden memperoleh jaminan investasi dari negara-negara yang dikunjungi hingga senilai setidaknya 249 triliun rupiah.

Jika lawatan ini harus ditinjau dari aspek prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif, keberhasilan sisi ekonomis tersebut harus dibandingkan dengan ongkos politik yang ternyata tidak ringan nilainya.

Pada lawatan di China yang menghasilkan kesepakatan 160 triliun rupiah investasi itu ternyata dibarengi dengan kontroversi pasal kesepakatan bersama (joint statement) mengenai kerja sama di wilayah yang tumpang-tindih antara RRC-RilI pada hal wilayah ini secara operasional tidak ada.

Beberapa pihak menyatakan bahwa hal ini merupakan 'kekeliruan teknis'. Dan presiden Prabowo telah menegaskan bahwa yang menyangkut kedaulatan negara kita tetap tegas tidak ada toleransi. Ada juga yang berpendapat bahwa kesepa-

katan kolaborasi, di mana pun tempatnya, adalah lebih baik daripada berkonflik. Apalagi berhadapan dengan China. Ada juga yang mengatakan bahwa prinsip politik kita adalah bebas aktif, jadi bisa saja berlaku tertentu karena memperoleh keuntungan tertentu, sementara di kesempatan lain ada perubahan lain karena ada pertimbangan lain.

Walaupun ini dianggap sebagai 'kekeliruan teknis' pihak lain bisa menilai bahwa politik bebas aktif itu berkonotasi buruk dalam pengertian oportunistik dan hipokrit.

Bayangkan apa yang bisa disimpulkan oleh AS sebagai negara kunjungan berikutnya, mengenai apa yang dilakukan oleh presiden Prabowo selama di China. Apalagi kira-kira dua minggu sebelumnya Menlu kita bergabung pada KTT BRICS dengan menyatakan keinginan RI untu menjadi negara mitra BRICS yang salah satu misi utamanya adalah dedolarisasi (anti AS).

Untung saja manuver Prabowo ke AS didahului dengan menelpon presiden AS terpilih(TrumpH) sebelum menemui Joe Biden, menyampaikan bahwa dia adalah didikan Amerika, sehingga brand bebas aktif menjadi mujarab manfaatnya. Semoga!

(Penulis adalah Guru Besar Emeritus Politik Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)-f

DIPASTIKAN MENDAPAT SUBSIDI BBM

Ojol Masuk Klasifikasi UMKM

JAKARTA (KR) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, ojek daring (ojek online/ojol) telah diputuskan masuk dalam kategori UMKM. Sehingga para pengemudi ojol akan tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi ojek online ini masuk dalam klasifikasi UMKM. Sektor UMKM adalah sektor yang tetap mendapatkan subsidi BBM," ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/12).

Keputusan itu, kata Maman, berdasarkan hasil rapat koordinasi dari Tim Satgas Subsidi BBM yang digelar beberapa waktu lalu, yang di dalamnya Kementerian UMKM turut terlibat dan mengusulkan UMKM mendapatkan alokasi BBM bersubsidi. Dengan demikian, para mitra ojol dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tetap mendapatkan alokasi BBM subsidi. Sementara aturan teknis soal penyaluran BBM subsidi ini berada dalam arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahilil Lahadalia dan kini tengah dilakukan

kajian.

Maman menambahkan bahwa, kendaraan roda empat yang menggunakan pelat kuning akan mendapatkan subsidi BBM, sementara plat yang bukan kuning tidak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi. "Yang disampaikan oleh Pak Bahilil (Menteri ESDM) itu, itu adalah sektor kendaraan, jadi pengguna kendaraan roda empat yang menggunakan pelat kuning mendapatkan subsidi BBM. Berarti kalau kendaraan roda empat yang tidak menggunakan pelat kuning, ya tidak mendapatkan subsidi BBM," katanya, seraya menambahkan bakal melakukan pertemuan dengan perwakilan mitra ojek daring terkait isu pencabutan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahilil Lahadalia memberi sinyal bahwa pengemudi ojol bakal tetap mendapatkan subsidi BBM, dengan menggunakan skema UMKM. "Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM," katanya. **(Ant/Has)-d**

Muhammadiyah

Bachtiar mengakui, apa yang dilakukan itu untuk memberikan solusi kepada persoalan-persoalan kader. "Pembinaan kader tidak hanya soal ideologi. Meski ideologi keislaman dan kemuhammadiyah harus kuat, tetapi penyiapan kader-kader yang mandiri secara ekonomi juga harus dikuatkan. MPKSDI membuka jalan, akses memfasilitasi kader-kader sarjana untuk bisa mandiri, kreatif, maju dan makmur," jelas Bachtiar.

Sambungan hal 1

Menurutnya, gerakan Muhammadiyah bisa maju dan berkembang salah satunya ditopang kekuatan dan kemapanan ekonomi segenap kader dan pimpinannya. "Kader yang kuat, menjadikan Muhammadiyah juga kuat.

"Oleh karena itu MPKSDI bersama Majelis Diktilitbang berinovasi mempersiapkan kader-kader sarjana Muhammadiyah untuk mandiri dengan virausaha," tegasnya. **(Fsy)-d**

DPR: Evaluasi

sanksi atas pernyataan Miftah Maulana yang memancing reaksi publik sebab kewenangan berada di pemerintahan.

"Sebagai Utusan Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah karena jabatan tersebut adalah menteri, Jadi kalau mau nanya ke saya apakah ada sanksi (atau) nggak ada sanksi, itu saya nggak bisa jawab karena bukan kewenangan dari saya," ujarnya.

Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat agar senantiasa menjaga persaudaraan sesama anak bangsa tanpa saling merendahkan. "Jadi marilah kita membangun Indonesia dengan saling menghormati, saling menghargai, jangan saling merendahkan Namun bangunlah Indonesia dengan rasa persaudaraan tanpa saling merendahkan," kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Kom-

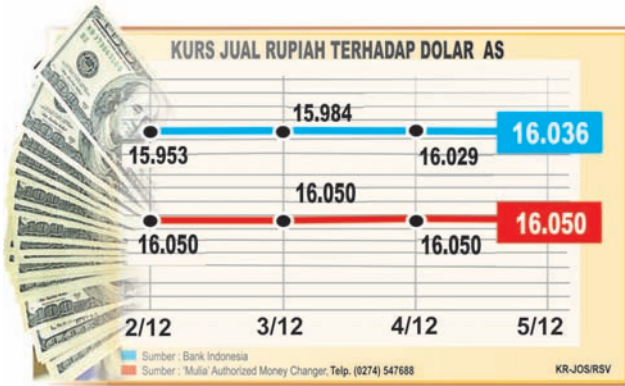
Sambungan hal 1

pleks Parlemen, Jakarta.

Puan menegaskan kembali bahwa Istana telah memberikan teguran kepada Miftah Maulana atas pernyataan viral yang dilontarkannya kepada penjual es teh.

"Istana sudah mengatakan bahwa jangan pernah melakukan hal itu, bahkan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden," ucapnya.

(Ant/Has)-f



Prakiraan Cuaca		Jumat 6 Desember 2024				
Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Dimi Hari	Suhu C	Kelambaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95
Cerah		Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	Hujan Pelir	

Grafis : Arko

Budaya Kerja Gen Z



Anik Sri Widawati, SSos MM
Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Amikom Yogyakarta

GENERASI Z atau biasa disebut Gen Z (generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012), saat ini sudah mulai memasuki dunia kerja. Sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi penuh dengan kemudahan

akses informasi, tentu memiliki karakteristik yang berbeda (unik) dengan generasi sebelumnya. Cara pandang mereka terkait pekerjaan, budaya kerja, dan lingkungan yang ideal (nyaman) akan berbeda pula.

Gen Z sangat nyaman dengan perangkat digital, alat kolaborasi online, dan teknologi dengan aplikasi pesan instan. Untuk meningkatkan produktivitas kerja pun, mereka berharap didukung oleh perangkat digital dengan teknologi terbaru. Hal ini membuat perusahaan pun harus beradaptasi, agar mampu menarik dan mempertahankan talenta mereka.

Gen Z juga dikenal

sebagai generasi yang kreatif dan adaptif terhadap lingkungan kerja yang cepat berubah. Tumbuh di era digital, menjadikan nya sangat cocok dengan dunia kerja yang serba digital pula. Menariknya lagi, mereka juga peduli akan makna dan tujuan pekerjaan. Membuat mereka cenderung mencari pekerjaan yang selaras dengan nilai pribadinya.

Namun demikian, Gen Z bukanlah tanpa kekurangan. Banyak dikeluhkan oleh penyedia lapangan pekerjaan, bahwa generasi ini cenderung mudah stress atau cemas dan sensitif terhadap tekanan atau tantangan. Karyawan Gen Z juga mengeluh terkait kesehatan mental mereka, yang bisa berdampak pada

produktivitas dan keterlibatan mereka.

Salah satu hal yang dicari Gen Z dalam bekerja adalah fleksibilitas. Mereka lebih memilih pekerjaan yang memungkinkan mereka bekerja dari mana saja, baik di rumah, kafe, atau ruang kerja bersama (co-working spaces). Fleksibilitas menjadi sebuah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Generasi ini cenderung tidak tertarik dengan budaya kerja yang menuntut jam kerja panjang atau pengorbanan waktu pribadi demi pekerjaan. Mereka lebih suka mencari pekerjaan yang memberikan waktu untuk hobi, keluarga, dan aktivitas

sosial. Mereka ingin merasa bahwa pekerjaan mereka bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga memiliki dampak positif pada masyarakat.

Kesehatan mental menjadi prioritas penting bagi Gen Z. Mereka lebih terbuka untuk berbicara tentang masalah kesehatan mental dan menginginkan perusahaan yang mendukung kesejahteraan karyawan, termasuk menawarkan program atau kebijakan yang mempromosikan kesehatan mental dan pengelolaan stres.

Untuk mempertahankan Gen Z, perusahaan penting untuk menciptakan program pengembangan karir yang

jelas dan menarik. Gen Z menghargai kesempatan untuk belajar hal baru dalam rangka untuk meningkatkan ketrampilan. Program pelatihan, mentoring, jalur karir yang jelas dan transparan akan membuat mereka merasa dihargai dan menjadikan loyal terhadap perusahaan.

Contoh perusahaan yang sukses menerapkan budaya kerja yang sesuai dengan Gen Z adalah perusahaan teknologi yang sudah mengadopsi sistem kerja jarak jauh dan menawarkan program pengembangan karir yang fleksibel. Di sinilah generasi ini merasa dihargai, dilibatkan, dan dapat berkontribusi sesuai harapan mereka.

Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan apalagi yang masih menerapkan manajemen tradisional. Karena seiring waktu, Gen Z akan mendominasi dunia kerja yang sekaligus membawa pengaruh besar dalam membentuk budaya kerja.

Kunci penting untuk membangun budaya kerja Gen Z bukan hanya sekedar terkait perubahan jam kerja ataupun lingkungan kerja, namun juga tentang cara pandang dalam bekerja. Fleksibilitas, kebermaknaan, transparansi komunikasi, dan rasa saling menghargai. Sehingga dapat membangun lingkungan kerja yang sukses di era Gen Z saat ini.